

Fund Fact Sheet Paket Investasi Simponi BNI Likuid Syariah

Profil DPLK BNI

Dana Pensiun Lembaga Keuangan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk didirikan oleh PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk berdasarkan Surat Keputusan Direksi pada tanggal 6 September 1993 dan telah mendapatkan pengesahan pada tanggal 28 Desember 1992 dari Menteri Keuangan Republik Indonesia.

Tujuan Investasi

Untuk mendapatkan tingkat pertumbuhan hasil investasi yang optimal melalui alokasi aset investasi pada instrumen Deposito dan/atau Pasar Uang dan instrumen Obligasi berbasis syariah yang dikelola dengan prinsip kehati-hatian dengan mempertimbangkan tingkat risiko yang ada.

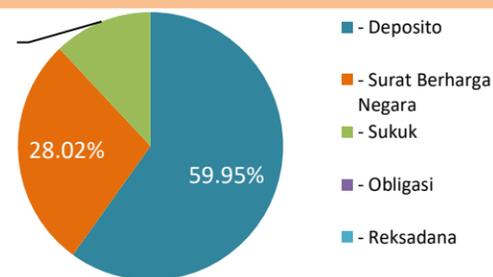
Profil Risiko Paket Investasi

Tipe Risiko : Moderat
Tingkat Risiko : Sedang

Kebijakan Investasi

100% dari nilai aset pada instrumen Deposito syariah dan/atau Pasar Uang syariah, dan Obligasi Syariah

Alokasi Aset :



Top 5 Holdings

Deposito :	Sukuk :
Bank BTN Syariah	Pemerintah RI
Bank Syariah Indonesia	PLN
Bank Permata Syariah	Bank CIMB Niaga
	Indosat

*) DP (Deposito), OB (Obligasi), SKK (Sukuk), SBN (Surat Berharga Negara), RD (Reksadana)

Kinerja Per 30-Nov-22

Paket Investasi	30 hari	3 bulan	6 bulan	1 Tahun	3 Tahun	5 Tahun
BNI Simponi Likuid Syariah	0.89	1.15	1.98	3.35	20.51	36.19
Benchmark *)	0.22	0.67	1.32	2.61	10.85	21.43

*) 100% TD 1 Mo, 3 Mo, 6 Mo SOE Banks dan LGOE Banks

Market Outlook

Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bank Indonesia pada 16-17 November 2022 memutuskan untuk menaikkan BI 7-Day Reverse Repo Rate (BI7DRR) sebesar 50 bps menjadi 5,25%, suku bunga Deposit Facility sebesar 50 bps menjadi 4,50%, dan suku bunga Lending Facility sebesar 50 bps menjadi 6,00%. Keputusan kenaikan suku bunga tersebut sebagai langkah front loaded, pre-emptive, dan forward looking untuk menurunkan ekspektasi inflasi yang saat ini masih tinggi dan memastikan inflasi inti ke depan kembali ke dalam sasaran 3,0±1% lebih awal yaitu ke paruh pertama 2023, serta memperkuat kebijakan stabilisasi nilai tukar Rupiah agar sejalan dengan nilai fundamentalnya akibat kuatnya mata uang dolar AS dan tingginya ketidakpastian pasar keuangan global, di tengah peningkatan permintaan ekonomi domestik yang tetap kuat.

Blndeks Harga Konsumen (IHK) pada November 2022 terkendali dan masih berada di bawah prakiraan awal. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), Inflasi IHK pada November 2022 tercatat rendah 0,09% (mtm), meskipun lebih tinggi dibandingkan dengan inflasi bulan sebelumnya yang mengalami deflasi 0,11% (mtm). Inflasi inti pada November 2022 terkendali. Inflasi inti tercatat sebesar 0,15% (mtm), sedikit menurun dibandingkan dengan inflasi bulan sebelumnya sebesar 0,16% (mtm). Bank Indonesia akan menggunakan strategi Operation Twist untuk melanjutkan pembelian SBN tenor panjang di sekunder pasar tahun depan, demikian keterangan Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo dalam pertemuan dengan Parlemen. Langkah ini bertujuan agar imbal hasil SBN tidak naik terlalu tinggi sehingga utang Pemerintah beban tersebut dapat tetap terkendali, mengingat tantangan global dan domestik pada tahun 2023. BI berharap rata-rata 10- Yield SUN tahun ini akan lebih rendah dari asumsi APBN 2023 sebesar 7,90%. Federal Reserve AS merilis risalah dari Rapat FOMC 1-2 November lalu, ketika Fed memutuskan untuk keempat kalinya menaikkan FFR sebesar 75bps ke kisaran 3,75%-4,00%. Berdasarkan menit, beberapa peserta melihat bahwa ketika kebijakan moneter mendekati sikap yang cukup ketat, akan menjadi tepat untuk memperlambat langkahnya kenaikan FFR. Sebagian besar peserta menganggap bahwa memperlambat laju kenaikan FFR bisa segera dipertimbangkan. Pada konferensi pers APBN Kita kemarin, Kementerian Keuangan RI menyampaikan realisasi terbaru APBN hingga Oktober 2022. Penerimaan negara selama 10M22 mencapai Rp2.181,6 triliun, tumbuh 44,5% dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya. Pencapaian ini ditopang oleh perekonomian yang terjaga dengan baik pemulihan, harga komoditas yang relatif tinggi, dan berbagai kebijakan Pemerintah. Belanja negara mencapai Rp2.351,1 triliun, tumbuh 14,2% dibandingkan periode yang sama tahun 2021. Defisit APBN mulai terjadi pada Oktober karena peran APBN sebagai shock absorber terhadap tekanan global dan domestik. Setelah sembilan bulan surplus, APBN pada Oktober mencatat defisit sebesar Rp169,5 triliun atau 0,91% dari PDB.

Disclaimer

Dokumen ini disiapkan oleh DPLK BNI hanya untuk kepentingan penyampaian informasi. Seluruh grafik dan gambar yang ditampilkan hanya digunakan untuk maksud ilustrasi. Kinerja masa lalu tidak bisa dijadikan sebagai indikasi untuk kinerja masa depan. Seluruh prediksi, perkiraan, atau ramalan pada kondisi ekonomi, pasar modal atau kecenderungan ekonomi yang terjadi pada pasar tidak bisa dijadikan sebagai indikasi untuk masa depan atau kemungkinan kinerja DPLK BNI.

Dana Pensiun Lembaga Keuangan PT. Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk
Gedung BNI Lantai 24, Jl. Jend. Sudirman Kav.1 Jakarta Pusat 10220,
Telp. (021) 5704223, 5728274, Facs (021) 2510175, Email dplk@bni.co.id